

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Sistem	5
2.2 Sistem Aplikasi Satuan Kerja.....	6
2.3 Kinerja Pegawai.....	7
2.4 Kinerja	8
2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan.....	9
2.6 Kerangka Berpikir	10
2.7 Pengujian Hipotesis	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	12
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	12
3.2 Jenis Penelitian	12

3.3	Populasi dan Teknik Penarikan Sampel	12
1.	Populasi Penelitian.....	12
2.	Teknik Penarikan Sampel	13
3.4	Teknik Pengumpulan Data	13
3.5	Alat Pengukur Data	14
1.	Uji Validitas	14
2.	Uji Reliabilitas	14
3.6	Teknik Analisis Data	15
1.	Analisis Regresi Linier Sederhana.....	15
2.	Pengujian Hipotesis	15
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	17
1.	Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut	17
2.	Struktur Organisasi	20
3.	<i>Job Description</i>	21
4.2	Deskripsi Objek Penelitian	26
4.3	Rincian Pengembalian Kuesioner.....	26
4.4	Analisis Data Kuantitatif	30
1.	Hasil Uji Validitas	30
a)	Uji Validitas Sistem Aplikasi Satuan Kerja.....	30
b)	Uji Validitas Kinerja Pegawai.....	31
2.	Hasil Uji Reliabilitas.....	32
4.5	Hasil Pengujian Hipotesis.....	32
1.	Variabel Sistem Aplikasi (X).....	32
2.	Uji Koefisien Determinasi	33
3.	Uji T (<i>Partial Individual Test</i>).....	34
4.6	Pembahasan dan Hasil Penelitian	34
1.	Penjelasan Hasil Uji T	35
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	37
5.1	Kesimpulan.....	37
5.2	Rekomendasi	37
	DAFTAR PUSTAKA	39
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan salah satu dampak dari perkembangan jaman. Adanya ketebukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Salah satu hasil pengembangan teknologi informasi yang banyak dimanfaatkan oleh organisasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya adalah sistem informasi. Laudon dan Laudon (2010, p46) mendefinisikan sistem informasi merupakan komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis masalah dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Keberhasilan penerapan sebuah sistem informasi sangat bergantung pada sistem apakah yang dibangun oleh perusahaan, apakah sistem ini mampu mengadaptasi kebutuhan perusahaan, mudah digunakan dan mampu menyajikan segala jenis informasi yang diperlukan. Pemanfaatan teknologi informasi hendaklah dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai, sehingga dapat terus mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Permasalahan yang kerap menjadi isu terbesar dalam era teknologi informasi ini adalah tindak penyimpangan berupa pencurian password, pemalsuan *account*, penyadapan jalur komunikasi, sistem komputer dan informasi dibajak, perusakan situs (*cracked*), *spamming/ junk mail*, virus, program perusak (*malicious code*), HAKI dan *copyright* disalahgunakan, *pornography*, pemalsuan uang, *money laundering*, maupun pemalsuan identitas. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dikenal dengan istilah *cyber crimes*.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu organisasi sektor publik membutuhkan Sistem Aplikasi Satuan Kerja untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sistem informasi yang diterapkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berupa "Sistem Aplikasi Satuan Kerja", yang merupakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi bagi Kanwil KemenkumHAM serta semua SATKER yang dibawahinya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tersedianya "Sistem Aplikasi Satuan Kerja" diharapkan dapat membantu setiap SATKER, untuk melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan SATKER. "Sistem Aplikasi Satuan Kerja dibuat untuk mempermudah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Implementasi sistem aplikasi satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan mempengaruhi kinerja pemerintahan

daerah dan kinerja Pegawai dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Implementasi sistem aplikasi satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap kinerja individu dalam Kantor tersebut. Menurut Mangkunegara (2012:9) Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pencapaian kinerja juga berkaitan dengan kesesuaian antara sistem informasi yang diterapkan dengan tugas, kebutuhan dan kemampuan individu dalam organisasi tersebut. Tugas, kebutuhan dan kemampuan individu hendaknya dipertimbangkan dalam menerapkan suatu sistem informasi dalam organisasi. Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam system informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pegawai pemakai sistem informasi sehingga sistem informasi kurang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULUT”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Implementasi sistem Aplikasi Satuan Kerja terhadap kinerja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja sistem aplikasi satuan kerja. Agar penelitian terfokus mengenai permasalahan diatas cakupan penelitian begitu luas, maka penulis

membatasi masalah pada dua faktor yaitu pengaruh implementasi sistem aplikasi satuan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SULUT.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menguji adanya pengaruh Implementasi sistem Aplikasi Satuan Kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi penerapan sistem informasi akuntansi sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat meningkatkan kemampuan Pegawai dalam penggunaan sistem informasi akuntansi pada aktivitas sehari-hari.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan pengaruhnya terhadap kinerja Pegawai. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam memecahkan masalah atas fakta yang terjadi selama penelitian, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi

3. Bagi calon peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan jadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis. Khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi